

**PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

IBADIL HADI
NPP. 29.1384

*Asdaf Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email:
ibadilhadi29@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research). structuring regional apparatus organizations in Bulukumba Regency, there are still various problems that cause obstacles in structuring regional apparatus organizations, the results of searches conducted by researchers on the internet, media and communication as well as with the organizational and communication divisions of Bulukumba Regency, there are various problems such as the commitment of the regional government of the Regency Bulukumba to produce a lean and efficient organization is not yet optimal and still lacks relevant human resources and funding from the APBD and also a flat organizational concept, based on vision-mission, lean, networking, maximizing functional positions, and an organization that is always learning, does not appear clearly in the policy.***Purpose:** *to find out and analyze the Organizational Arrangement of the Regional Apparatus, to know and analyze the supporting and inhibiting factors of the Regional Apparatus Organizational Arrangement, to know and analyze the efforts to overcome the inhibiting factors of the Regional Apparatus Organizational Arrangement***Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation***Result:** *: Structuring Regional Apparatus Organizations in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province; Organizational Arrangement of Regional Apparatus Based on Regional Government Affairs/Authorities; Flexibility: Organizational Arrangement of Regional Apparatuses in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province, implements the effectiveness of structuring the regional secretariat of Bulukumba Regency with rationality, as needed, efficiency, which can function optimally, can achieve optimal target results, can use budget appropriately and efficiently, able to anticipate the development and improvement of tasks/jobs, and be able to overcome problems or obstacles/obstacles that arise in the implementation of tasks and functions.***Conclusion:** *Structuring the Organization of Regional Apparatuses in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province has been running well, efficiently and effectively, it can be seen from the duties and functions of each regional apparatus organization carried out. Internal factors from human resources and the budget have support and commitment in every implementation of the program that has been launched even though there are still obstacles in its implementation.*

Keywords: *Structuring, Organization, Regional Apparatus*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan terhambatnya dalam penataan organisasi perangkat daerah, hasil penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti di internet, media dan komunikasi serta dengan Bagian organisasi, birokrasi dan reformasi Kabupaten Bulukumba terdapat berbagai masalah seperti komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk menghasilkan organisasi yang ramping dan efisien belum optimal dan masih kurangnya sumber daya manusia yang relevan dan pendanaan dari APBD dan juga konsep organisasi yang datar, berdasarkan visi-misi, ramping, bersifat jejaring, memaksimalkan jabatan fungsional, dan organisasi yang selalu belajar, tidak muncul dengan jelas dalam kebijakan. **Tujuan:** untuk mengetahui dan menganalisis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Penataan Organisasi Perangkat daerah, mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor penghambat Penataan Organisasi Perangkat Daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berbasis Urusan/Kewenangan Pemerintahan Daerah; **Fleksibilitas:** Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan efektivitas penataan organisasi sekretariat daerah Kabupaten Bulukumba dengan rasionalitas, sesuai kebutuhan, efisiensi, yang dapat berfungsi secara optimal, dapat mencapai target hasil yang optimal, dapat menggunakan anggaran secara tepat dan efisien, mampu mengantisipasi perkembangan dan peningkatan tugas/pekerjaan, dan mampu mengatasi permasalahan atau hambatan/kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. **Kesimpulan:** Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik, efisien dan efektif dapat dilihat dari tugas dan fungsi masing masing organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan. Faktor internal dari sumber daya manusia dan anggaran memiliki dukungan dan komitmen dalam setiap pelaksanaan program yang telah dicanangkan meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Penataan, Organisasi, Perangkat Daerah



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan. Pada dasarnya struktur merupakan peta alur kerja di dalam organisasi, dimana mengenai besaran akan kebutuhan organisasi di tentukan dalam bentuk kelembagaan yang tepat sebagai wadah untuk mengelola semua urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya kebutuhan akan model organisasi yang menanganinya. Fenomena desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia bukanlah respon normatif terakhir pada issue administrasi publik, namun fenomena ini ternyata penuh dengan romantika dan problematikanya sendiri sampai saat ini. Sebagai gambaran salah satu wujud implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Wacana model pembenahan birokrasi mulai mengemuka dalam kaitannya dengan reformasi manajemen pemerintahan. Kajian pemerintahan yang bersifat klasik menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip liberalisme yang dikaitkan dengan kapitalisme perekonomian global menjadi dasar bagi perjuangan kepentingan politik negara-negara kapitalis untuk mendorong perubahan konstruksi kenegaraan di negara-negara berkembang. Kebijakan desentralisasi di Indonesia dewasa ini merupakan landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Penataan kelembagaan perangkat daerah yang merupakan konsekuensi dari kewenangan tidak lain adalah sebagai suatu bentuk pengembangan organisasi. Gejala pembengkakan organisasi perangkat daerah selain menimbulkan inefisiensi penggunaan sumberdaya, juga berdampak pada melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan urusan, yang seharusnya ditangani satu kesatuan unit menjadi beberapa unit organisasi. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah, organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Seiring dengan berjalannya waktu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Berdasarkan uraian diatas dan pengamatan Peneliti, mengenai penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan terhambatnya dalam penataan organisasi perangkat daerah, hasil penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti di internet, media dan komunikasi serta dengan Bagian organisasi, birokrasi dan reformasi Kabupaten Bulukumba terdapat berbagai masalah seperti komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk menghasilkan organisasi yang ramping dan efisien belum optimal dan masih

kurangnya sumber daya manusia yang relevan dan pendanaan dari APBD dan juga konsep organisasi yang datar, berdasarkan visi-misi, ramping, bersifat jejaring, memaksimalkan jabatan fungsional, dan organisasi yang selalu belajar, tidak muncul dengan jelas dalam kebijakan. serta ketidakjelasan kewenangan/tumpang tindih kewenangan, ketidakseimbangan kemampuan keuangan, pola kelembagaan yang cenderung besar dan seragam. Berdasarkan permasalahan tersebut yang terjadi dalam penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba sehingga pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip "*Tepat struktur tepat fungsi*" tidak dapat berjalan dengan optimal seperti prinsip pengembangan kelembagaan tersebut. Dari uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan mengambil judul "**PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN**"

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan terhambatnya dalam penataan organisasi perangkat daerah, hasil penelusuran yang dilikaukan oleh Peneliti di internet, media dan komunikasi serta dengan Bagian organisasi, birokrasi dan reformasi Kabupaten Bulukumba terdapat berbagai masalah seperti komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk menghasilkan organisasi yang ramping dan efisien belum optimal dan masih kurangnya sumber daya manusia yang relevan dan pendanaan dari APBD dan juga konsep organisasi yang datar, berdasarkan visi-misi, ramping, bersifat jejaring, memaksimalkan jabatan fungsional, dan organisasi yang selalu belajar, tidak muncul dengan jelas dalam kebijakan. Serta ketidakjelasan kewenangan/tumpang tindih kewenangan, ketidakseimbangan kemampuan keuangan, pola kelembagaan yang cenderung besar dan seragam.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Khoirul Anam(2019), berjudul "Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Tinjau". Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Peyusunan peraturan bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten jember secara prinsip belum sesuai dengan aturan yang ada Peraturan bupati nomor 44 tahun 2016 secara substantive belum memenuhi prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien ditinjau dari teori mintzberg. kerja dengan memberikan instruksi pengoperasian, deskripsi pekerjaan, aturan, peraturan, dan seterusnya. Pelatihan, mengacu pada penggunaan program pembelajaran formal untuk membangun tugas spesifik. Indoktrinasi, program makna dan teknik dengan standarisasi norma-norma bekerja sehingga mereka dapat dipercaya untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sesuai dengan ideologi organisasi. Kedua, Suaib (2018) dari, berjudul "Pembentukan Dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah" Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Organisasi perangkat daerah merupakan suatu wadah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang didesain untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. Penataan, Kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang

lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan Penelitian adalah sebagai berikut: mengetahui dan menganalisis penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Simangunsong (2014:62) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

3.1.1 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berbasis Urusan/Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pada dasarnya struktur merupakan peta alur kerja di dalam organisasi, dimana mengenai besaran akan kebutuhan organisasi ditentukan dalam bentuk kelembagaan yang tepat sebagai wadah untuk mengelola semua urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya kebutuhan akan model organisasi yang menanganinya.

3.1.2 Fleksibilitas

Dimana secara umum, konteks fleksibilitas dalam penyusunan organisasi perangkat daerah lebih ditekankan pada bagaimana suatu organisasi dapat dengan mudah merespon dinamisasi perkembangan lingkungan baik pada skala makro, meso maupun mikro. Suatu urusan dengan tingkat beban kerja yang besar bisa jadi membutuhkan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar penanganan atau pelaksanaan urusan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Organisasi selalu menerima dan mengedepankan kemajuan dan perkembangan yang terjadi. Tujuan utama organisasi adalah kerja sama mencapai kemajuan, sehingga perubahan akan selalu diterima dan dikembangkan oleh organisasi itu sendiri. Tentunya perubahan yang dimaksud ad dalam Melakukan Penataan Organisasi itu sendiri akan mengidentifikasi perkembangan yang terjadi dilingkungan dan mengambil pelajaran untuk perbaikan dan perkembangan organisasi. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terkait mobilisasi yang terjadi untuk dijadikan bahan acuan pengambilan keputusan untuk mengadakan adaptasi pada perubahan dalam menjalankan kelanjutan organisasi. alah yang bernilai positif dan berdampak baik untuk organisasi yang dimaksud.

3.1.2.1 Efektivitas

Setiap urusan baik dengan tingkat beban kerja besar, sedang maupun kecil, perlu ditangani dengan baik untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas kelembagaan dalam menangani urusan dapat dikatakan baik apabila tujuan dan sasaran dari pelaksanaan urusan tersebut dapat tercapai dengan optimal sehingga efektivitas lebih ditekankan pada bagaimana kelembagaan daerah mampu berkontribusi positif pada pencapaian visi dan misi daerah secara keseluruhan dengan melaksanakan beban urusan yang diembannya dengan prioritas utama untuk kemajuan masyarakat daerah setempat. Penataan organisasi perangkat daerah di kabupaten bulukumba provinsi sulawesi selatan melaksanakan efektivitas penataan organisasi sekretariat daerah kabupaten bulukumba dengan rasionalitas, sesuai kebutuhan, efisiensi, yang dapat berfungsi secara optimal, dapat mencapai target hasil yang optimal, dapat menggunakan anggaran secara tepat dan efisien, mampu mengantisipasi perkembangan dan peningkatan tugas/pekerjaan, dan mampu mengatasi permasalahan atau hambatan/kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

3.1.2.2 Efisiensi

Pendefisian efisiensi ini juga dikaitkan dengan model organisasi yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan, dimana terdapat 2 (dua) model organisasi yang digunakan yaitu *model matriks* dan *model lini and staff*. Kedua model tersebut sama-sama baik bila disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang diemban oleh setiap kelembagaan. Efisiensi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah dioptimalkan secara proporsional. Urusan kewenangan yang ditentukan dari keberhasilan implementasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah dimana regulasinya menuntut pemerintah daerah harus menaungi seluruh urusan kewenangan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

3.1.2.3 Proporsional

Yakni pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang ada harus terbagi habis pelaksanaannya oleh kelembagaan yang terbentuk dan pembagian urusan tersebut harus merata dan proporsional antar lembaga perangkat daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi ketimpangan beban kerja antar lembaga yang terbentuk. Artinya beban urusan dengan kategori tinggi sebaiknya dilaksanakan oleh kelembagaan kecil atau bila memungkinkan dilekatkan pada kelembagaan yang juga menangani fungsi lain. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai porsinya masing-masing. Penentuan perumpunan urusan kewenangan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah.

3.1.3 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berbasis Visi Dan Misi Pemerintahan Daerah

Penataan organisasi perangkat daerah berbasis visi dan misi daerah merupakan nyawa/roh dari perkembangan dan eksistensi dari suatu organisasi perangkat daerah karena visi dan misi menjadi *core business* (bisnis inti) yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan, mengarahkan, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sebuah daerah menuju daerah yang sejaterah. Kinerja organisasi perangkat daerah akan sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi proses bisnisnya, dimana Proses bisnis akan dinilai bagus jika berhasil mencapai tujuan dengan efektif dengan mensinergikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

3.1.3.1 Analisis Dan Tetapkan Urusan Pilihan Yang Menjadi Core Business (Bisnis Inti)

Analisis dan Tetapkan Urusan Pilihan yang menjadi *Core Business* (Bisnis Inti) daerah karena statement visi dari suatu daerah baik itu dalam dokumen jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek haruslah memasukkan “urusan pilihan” yang menjadi icon dalam proses bisnis yang akan bangun oleh kepala daerah dan jajarannya dalam mensejahterakan masyarakat lokal, apakah kehidupan masyarakatnya lebih banyak pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral dan transmigrasi jika masyarakatnya hidup dari urusan pertanian, maka sebaiknya pemerintah daerah membentuk dan memperkuat organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pertanian. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat visi dan misi Kabupaten Bulukumba dimana salah satu misinya yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik, sehingga pemerintah saat ini sudah diupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah dengan terorganisir dan efektif.

3.1.3.2 Menyusun Lebih Awal Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Wajib bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk menjalankan urusan pilihan menjadi *Core Business* (Bisnis Inti) Daerah untuk menyusun lebih awal program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai rancangan awal proses bisnis baru yang akan diikuti oleh perangkat daerah lainnya. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun lebih awal program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai rancangan awal proses bisnis baru sudah sejalan dengan kebutuhan dan kewenangan daerah, hal tersebut dapat dilihat dari sistematika peyelenggaraannya yang secara umum sudah terorganisir dengan baik. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan banyak pengalaman dalam mengembangkan program dengan cara terus merancang bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah namun juga tetap sejalan dengan kewenangan yang dimiliki.

3.1.3.3 Menetapkan Target Dan Capaian Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Wajib bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk menjalankan urusan pilihan menjadi *Core Business* (Bisnis Inti) Daerah untuk menetapkan target dan capaian untuk kesejahteraan masyarakat daengan melakukan ujicoba pencapaian dan sinkronisasi proses bisnis organisasi perangkat daerah. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah mencoba untuk membenahi dan memperbaiki dalam berbagai aspek dari perangkat daerah melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala. Meski tidak dapat langsung diatasi secara sekaligus, tetapi setidaknya ada progres yang berjalan dari pembenahan secara perlahan namun pasti ini.

3.1.3.4 Melakukan Proses Review Ujicoba Pencapaian Dan Sinkronisasi

Wajib bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk menjalankan urusan pilihan menjadi *Core Business* (Bisnis Inti) Daerah melakukan proses *review* ujicoba pencapaian dan sinkronisasi proses bisnis organisasi perangkat daerah. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan perbaikan dalam pembentukan organisasi adalah reorganisasi perangkat daerah dan meningkatkan kualitas dari tenaga kerja sesuai dengan standar visi misi pemerintah Kabupaten Bulukumba.

3.1.3.5 Melakukan Penyempurnaan Proses Bisnis Organisasi Perangkat Daerah

Wajib bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk menjalankan urusan pilihan menjadi *Core Business* (Bisnis Inti) Daerah melakukan penyempurnaan proses bisnis organisasi perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, peneliti berhasil mendapatkan 3 informan dari 3 informan yang telah ditentukan untuk menjadi data primer dalam menganalisis bagaimana Penataan Organisasi

Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi telah berusaha untuk menyempurnakan penataan organisasi perangkat daerah dengan cara yaitu memperhatikan kinerja dari perangkat daerah, kebutuhan dan kemampuan dari perangkat daerah, peraturan yang berlaku serta aspek penilaian dari organisasi itu sendiri.

3.1.3.6 Melakukan Proses Penetapan Terhadap Analisis Kebutuhan

Wajib bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk menjalankan urusan pilihan menjadi *Core Business* (Bisnis Inti) Daerah melakukan proses penetapan terhadap analisis kebutuhan dalam pencapaian dan sinkronisasi proses bisnis organisasi perangkat daerah. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan proses penetapan masalah melalui identifikasi dengan kebutuhan serta pengkajian dan penelitian oleh bagian organisasi, reformasi dan birokrasi sekretariat daerah serta badan penelitian pembangunan daerah telah diusahakan semaksimal mungkin.

3.1.3.7 Melakukan Proses Implementasi Berkelanjutan Dalam Pencapaian Dan Sinkronisasi

Ajib bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk menjalankan urusan pilihan menjadi *Core Business* (Bisnis Inti) Daerah melakukan proses implementasi berkelanjutan dalam pencapaian dan sinkronisasi proses bisnis organisasi perangkat daerah. Penetapan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah berdasarkan visi misi Kabupaten Bulukumba yang tertera dalam RPJMD dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3.1.3.8 Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Serta Pelaporan Secara Berkala

Wajib bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk menjalankan urusan pilihan menjadi *Core Business* (Bisnis Inti) Daerah melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala dalam pencapaian dan sinkronisasi proses bisnis organisasi perangkat daerah. monitoring dan valuasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dilihat melalui fleksibilitas mengenai besaran akan kebutuhan organisasi yang ditentukan dalam bentuk kelembagaan yang tepat sebagai wadah untuk mengelola semua urusan pemerintahan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Khoirul Anam(2019) , berjudul “Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Tinjau”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Peyusunan peraturan bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten jember secara prinsip belum sesuai dengan aturan yang ada Peraturan bupati nomor 44 tahun 2016 secara substantive belum memenuhi prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dtinjau dari teori mintzberg. kerja dengan memberikan instruksi pengoperasian, deskripsi pekerjaan, aturan, peraturan, dan seterusnya. Pelatihan, mengacu pada penggunaan program pembelajaran formal untuk membangun tugas spesifik. Indoktrinasi, program makna dan teknik dengan standarisasi norma-norma bekerja sehingga mereka dapat dipercaya untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sesuai dengan ideologi organisas. Suaib (2018) dari , berjudul “Pembentukan Dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah” Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Organisasi perangkat daerah merupakan suatu wadah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang didesain untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. Penataan , Kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah.Pembaharuan

penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik, efisien dan efektif dapat dilihat dari tugas dan fungsi masing masing organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan. Faktor internal dari sumber daya manusia dan anggaran memiliki dukungan dan komitmen dalam setiap pelaksanaan program yang telah dicanangkan meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

IV. KESIMPULAN

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berbasis Urusan/Kewenangan Pemerintahan Daerah; Fleksibilitas: Tujuan utama organisasi adalah kerja sama mencapai kemajuan, sehingga perubahan akan selalu diterima dan dikembangkan oleh organisasi itu sendiri; Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan efektivitas penataan organisasi sekretariat daerah Kabupaten Bulukumba dengan rasionalitas, sesuai kebutuhan, efisiensi, yang dapat berfungsi secara optimal, dapat mencapai target hasil yang optimal, dapat menggunakan anggaran secara tepat dan efisien, mampu mengantisipasi perkembangan dan peningkatan tugas/pekerjaan, dan mampu mengatasi permasalahan atau hambatan/kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi: Efisiensi: Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah dioptimalkan secara proporsional. Proporsional: Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai porsi masing-masing; Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berbasis Urusan/Kewenangan Pemerintahan Daerah; Analisis Dan Tetapkan Urusan Pilihan Yang Menjadi Core Business (Bisnis Inti) : Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat visi dan misi Kabupaten Bulukumba dimana salah satu misinya yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik, terorganisir dan efektif; Menyusun Lebih Awal Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan: Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun lebih awal program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai rancangan awal proses bisnis baru sudah sejalan dengan kebutuhan dan kewenangan daerah; Menetapkan Target Dan Capaian Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah mencoba untuk membenahi dan memperbaiki dalam berbagai aspek dari perangkat daerah melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala; Melakukan Proses Review Ujicoba Pencapaian Dan Sinkronisasi: reorganisasi perangkat daerah dan meningkatkan kualitas dari tenaga kerja sesuai dengan standar visi misi pemerintah Kabupaten Bulukumba; Melakukan Penyempurnaan Proses Bisnis Organisasi Perangkat Daerah memperhatikan kinerja dari perangkat daerah, kebutuhan dan kemampuan dari perangkat daerah, peraturan yang berlaku serta aspek penilaian dari organisasi itu sendiri. Melakukan Proses Penetapan Terhadap Analisis Kebutuhan: proses penetapan masalah melalui identifikasi dengan kebutuhan serta pengkajian dan penelitian oleh bagian organisasi dan tata laksana sekretariat daerah serta badan penelitian pembangunan daerah telah diusahakan semaksimal mungkin. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Simangunsong saja. **Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Simangunsong, F. (2021). *Penataan Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Khoirul Anam. (2019) “*Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Tinjau*”.

Suaib . (2018) , “*Pembentukan Dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah*”

